

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Oleh:

Albert Riyadi Suwono

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

e-mail: advokatbunadi@gmail.com

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi Yang Didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, membahas masalah (1) Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, tidak sah dan melawan hukum. Karena terjadi penyidikan ganda, padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestaes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama. (2) akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, serta cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

Kata Kunci: Laporan Polisi, Perbuatan Melawan Hukum

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹

Karena korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*). Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Terkait dengan masalah perbuatan melawan hukum tersebut, penulis kemukakan disini tentang Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017).

Terbitnya putusan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya atau akibat adanya pengaduan dan laporan polisi palsu yang berisi keadaan tidak sebenarnya dan fitnah yang sengaja dibuat oleh seseorang di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah (vide. Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat dan/atau Pencucian Uang, dan ditindaklanjuti oleh Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/Jateng/ Ditreskrimsus

¹ Keeton, et.al, *Tort and Accident Law*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983, hlm. 1

Tanggal 3 Januari 2017), Akhirnya terlapor ditetapkan sebagai Tersangka dan dimasukkan dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Karena tersangka tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan diatas, akhirnya yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui pengadilan dan akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2020, bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepadanya melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017 adalah batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik guna melakukan penelitian lebih lanjut untuk dituangkan dalam karya ilmiah. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum ? (2) Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?

B. METODE PENELITIAN

Terkait dengan kegiatan penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan yang koheren tentang hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu sebagai produk kekuasaan tertentu.² Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan di kembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma seperti asas-asas norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni: “pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji teks pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

²Soetandio Wiknyosubroto, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan' Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, BPHN Departemen Kehakiman 1995, hlm. 5

³_____, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma Jakarta, 2002, hlm. 148

terkait”.⁴ Disamping itu juga pendekatan kasus (*case approach*), yakni “pendekatan penelitian menggunakan pendekatan melalui pengkajian atas alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi*)”.⁵

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya ikat, dan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas,⁶ terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang berlaku, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan batal demi hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian”.⁷ Sementara itu, “bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti: bibliografi, indeks majalah hukum, ensiklopedi hukum, direktori, kamus hukum dan seterusnya”.⁸

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

⁴Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam' Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.17

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum'*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm.119

⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum'*, Penerbit Alfa Beta, Bandung, 2015, hlm. 67

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Studi dokumen bisa dilakukan dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan batal demi hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017. Hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi ini kemudian dicatat dalam kartu penelitian dengan tujuan guna memudahkan penyusunannya dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan.

Setelah seluruh bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Dalam melakukan analisis bahan hukum ini penulis menggunakan cara preskriptif analisis, yakni mengadakan analisa dengan mendiskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan permasalahan yang dibahas mengenai masalah perbuatan melawan hukum, sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi yang Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam analisa penulis, penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surakarta, karena penggugat merasa dirugikan bahkan sampai tidak dapat melaksanakan kegiatan dan tugas pekerjaannya sebagai seorang advokad senior atau kurator senior, karena telah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan DPO (daftar pencarian orang). Padahal ia telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Hal ini terbukti pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa proses pemberesan harta pailit dalam kepailitan oleh kurator adalah wewenang Pengadilan Niaga dan mana telah diperiksa pertanggungjawabannya oleh Hakim Pengawas yang telah selesai/berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 9/Pdt.Sus-Pailit12015/PN.Smg. tanggal 1 April 2016).

Demikian pula pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sebagai pelaksana perintah undang-undang dan Hakim Pengawas tidak dapat dipidana dan berarti bukan perbuatan melawan hukum, artinya penggugat yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang kurator tidak dapat di pidana, karena tugas yang dilaksanakannya tersebut diatur oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 50 KUHPidana dan Pasal 51 KUHPidana sebagaimana telah penulis kemukakan diatas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang diterangkan dan didalilkan Termohon Keberatan I/ Pemohon Keberatan II / Tergugat terhadap Pemohon Keberatan I/ Termohon Keberatan II / Penggugat, sebagaimana keterangan-keterangan dalam Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat dan/atau Pencucian Uang (Bukti P-1 sama dengan Bukti T-30), Laporan Polisi Nomor : LP/B/2/I/2017/Jateng/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2017 (Bukti P-2A sama dengan Bukti T-31) juga tidak terbukti menurut hukum, dan merupakan fitnah yang beritikad buruk, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemohon keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat tidak terbukti dan tidak ada, justru sebaliknya Majelis Hakim berpendapat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak dari Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat dengan membuat surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat dan/atau Pencucian Uang (vide. Bukti P-1 sama dengan Bukti T-30), dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/Jateng/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2017 kepada Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah, yang seyogyanya sudah diketahuinya sejak semula bahwa Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat sebagai kurator bertindak menjalankan perintah undang-undang dan Hakim Pengawas sebagai *Kekuasaan Negara dibidang Yudisial* yang sah menurut hukum, sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 9/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Smgl tanggal 10 Agustus 2015 tentang *perintah penyerahan asset*

dan lelang (vide. Bukti P-5B), Surat Kantor Kurator Albert Riyadi Suwono, SH., M.Kn. tertanggal 12 Agustus 2015, *Perihal : Permintaan Nomor Rekening Bank Guna Melakukan Penyetoran/ Pembayaran Apabila Telah Terdapat Pembagian Hasil, Penjualan Harta Pailit Dari Nasabah/Debitor TAN AGUNG SWITONO dan Permintaan Dokumen Kepemilikan Berkaitan Dengan Barang jaminan Atas Utang Yang Termasuk Dalam Harta Pailit* (vide. Bukti T-13), Surat BCA No. 0985/KWII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 (vide. Bukti T-14), dan Akta Penyerahan No. 39 tanggal 15 September 2015 yang dibuat dihadapan Prof Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MR, MM. Notaris di Semarang antara Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat sebagai kurator dengan Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat sebagai kreditor (vide. Bukti P-5C sama dengan Bukti T-16) ;

Keterangan-keterangan dari Tergugat dalam Surat Pengaduan BCA Nomor: 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat dan/atau Pencucian Uang (Bukti P-1 sama dengan Bukti T-30), Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/Jateng/ Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2017 (Bukti P-2A sama dengan Bukti T-31), tidak terbukti menurut hukum, dan merupakan fitnah yang beritikad buruk, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemohon keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat tidak terbukti dan tidak ada,

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles tentang keadilan korektif (remedial) berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku'. Karena itu, adalah tepat apa yang sudah dilakukan oleh penggugat dalam kasus ini dalam menuntut keadilan, karena apa yang dilakukannya adalah telah sesuai dengan undang-undang.

Tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, harus diketahui dan dipahami oleh aparat kepolisian, apakah pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan, perbuatan curang,

pemalsuan surat dan/atau pencucian uang dan sebagainya. Jika tindakan pihak yang diadukan atau terlapor itu sesuai dengan perintah undang-undang, maka tidak bisa dilanjutkan tindakan hukum membuat laporan polisi. Itulah maka betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian khususnya dalam bidang hukum ekonomi, terutama yang terkait dengan masalah kepailitan.

Disamping itu, Majelis Hakim juga telah menimbang dan memperhatikan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor: B/SP2HP/13167/XI/2018/Reskrimsus tanggal 14 November 2018 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (vide. Bukti T-38), Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. B/957/IX/2019/Reskrimsus tanggal 9 September 2019 Perihal: Informasi Penanganan perkara (vide. Bukti T-40), Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. B/SPDP/108/X/2019/Reskrimsus tanggal 28 Oktober 2019 Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan terlapor ALBERT RIYADI SUWONO (PENGGUGAT), dkk. (vide. Bukti P-8 yang sama dengan Bukti T-41) dimana terbukti tetap adanya upaya penyidikan berdasarkan Surat Pengaduan BCA No. 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 Perihal: Pengaduan Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat Dan Atau Pencucian Uang (Vide. Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-30), dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/ JATENG/DITRESKRIMSUS tanggal 3 Januari 2017 (vide. Bukti P-2A yang sama dengan Bukti T-31) yang dibuat Termohon keberatan / Tergugat terhadap Pemohon Keberatan/Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pid.Pra/20181PN.Smg. tanggal 22 Oktober 2018 tersebut (vide. Bukti P-7 yang sama dengan Bukti T-39), dengan alasan yang dinyatakan tidak sah adalah proses penyidikannya karena ganda.

Sementara itu, Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2/I/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS tanggal 3 Januari 2017 tersebut yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat tetap sah, menurut hemat Majelis Hakim adalah pendapat yang keliru, karena setelah Majelis Hakim mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor: 11/Pid.Pra/2018/PN. Smg. tanggal 22 2018, ternyata sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestaes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama (vide. Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-16, dan Bukti P-18).

Dengan dibuatnya Surat Penyidikan baru (Surat Nomor: B/SPDP/108/X/2019/Reskrimsus tanggal 28 Oktober 2019) yang diterbitkan berdasarkan Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS 3 Januari 2017 yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat tentunya akan menjadikan penyidikan ganda lagi yang tidak sah dan melawan hukum,

Dengan demikian, keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, dipertanyakan ? Karena telah terjadi penyidikan ganda padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestaes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama.

2. Akibat Hukum Dari Laporan Polisi yang Dibuak Dengan Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Selengkapny dapat dilihat bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/977/IX/2016/ BARESKRIM Halaman 55 dari 63 Putusan Keberatan atas Perkara Nomor 3/Pdt/G.S/2020/PN.Skt tanggal 30 September 2016 merupakan hak dari Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat sebagai saksi korban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat tersebut, sehingga tindakan Pemohon Keberatan I / Termohon Keberaan II / Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/977/IX/2016/BARESKRIM tanggal 30 September 2016 tentang Tindak Pidana Pengaduan Palsu kepada orang yang sedang menjalankan kekuasaan yang

sah dengan pengaduan tertulis kepada penguasa dan atau menggunakan surat palsu dan atau tindak pidana perbankan (Pasal 317 Jo. Pasal 316 dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) di Piket Siaga Bareskrim Polri, menurut Majelis Hakim adalah sah dan harus memperoleh perlindungan hukum ;

Begitu pula seterusnya, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan keadilan dan kepastian hukum bahwa dengan dinyatakan Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat melawan hukum, karena membuat Surat Pengaduan BCA Nomor: 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS tanggal 3 Januari 2017, yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat, maka penyidikan terhadap Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat tersebut batal demi hukum, cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan, dan kemudian berlaku penyidikan atas Laporan Polisi Nomor LP/977/IX/2016/BARESKRIM tanggal 30 September 2016 tentang Tindak Pidana Pengaduan Palsu kepada orang yang sedang menjalankan kekuasaan yang sah dengan Pengaduan tertulis kepada penguasa dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau tindak pidana perbankan (Pasal 317 KUHPidana Jo. Pasal 316 KUHPidana dan/atau Pasal 263 KUHPidana dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) (vide. Bukti P- 19A), guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat sebagai saksi korban yang sebenarnya ;

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa:

- Pasal 10 ayat (1) : "Saksi Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik";

- Pasal 10 ayat (2) :”Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

sehingga penggugat sebagai saksi korban yang sebenarnya harus dilindungi secara hukum dan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Majelis Hakim sependapat dengan sebagian besar pertimbangan hukum Hakim Tunggal yang telah tepat, benar dan lengkap, sehingga mengambil-alih sebagian besar pertimbangan hukum Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor : 3/Pdt.G.S./2020/PN.Skt. tanggal 20 Pebruari 2020 dengan sekedar memberikan perbaikan secukupnya dengan mengadili sendiri atas petitum gugatan ke-3 tentang keabsahan tindakan Tergugat membuat surat pengaduan dan laporan polisi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang seyogyanya masih satu rangkaian peristiwa yang berhubungan dalam upaya hukum gugatan a quo, dan petitum ke-7 dan ke-8 gugatan tentang jumlah nilai ganti rugi yang diberikan Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat kepada Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat dengan memperhatikan penetapan status Tersangka tanggal 25 Setember 2017 (vide. Bukti P-2D yang sama dengan Bukti T-35) dari lamanya masa DPO sejak tanggal 11 Januari 2018 (vide Bukti P-2E dan Bukti T-37) yang merupakan tindakan perampasan hak asasi manusia, hingga tindakan penyidikan dinyatakan tidak sah pada tanggal 22 Oktober 2018 (vide. Bukti P-7 yang sama dengan Bukti T-39 berupa : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/Pid.Pra/2018/PN.Smg. tanggal 22 Oktober 2018), kerugian Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat karena terganggunya dalam mencari nafkah sesuai pekerjaannya sebagai Advokat Senior anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) (vide. P-20A), dan Kurator Senior anggota AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) (vide. P-20B), dan kemampuan ekonomi Termohon keberatan I/ Pemohon Keberatan II / Tergugat, yang semula ditetapkan hanya kerugian materiil sebesar Rp. 1.083.731,- (satu juta delapan

puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), diperbaiki menjadi kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, tentang keberatan Pemohon keberatan I/ Termohon Keberatan II / Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, karena Majelis Hakim sependapat pertimbangan hukum Hakim Tunggal dan dengan jawaban point 30 yang diajukan Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat bahwa “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/SipN972 tanggal 26 Februari 1973.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Penggugat dan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan keberatan ini yang akan dihitung dan disebutkan dalam amar putusan ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, tidak sah dan melawan hukum. Karena terjadi penyidikan ganda, padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama. Sementara itu, Surat Pengaduan BCA Nomor 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS tanggal 3 Januari 2017 tersebut yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat tetap sah, menurut hemat Majelis Hakim adalah pendapat yang keliru, karena setelah Majelis Hakim mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pid.Pra/2018/PN. Smg. tanggal 22 2018, ternyata sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal

Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama (vide. Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-16, dan Bukti P-18). Dengan dibuatnya Surat Penyidikan baru (Surat Nomor: B/SPDP/108/X/2019/Reskrimsus tanggal 28 Oktober 2019) yang diterbitkan berdasarkan Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS 3 Januari 2017 yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat, tentunya akan menjadikan penyidikan ganda lagi yang tidak sah dan melawan hukum,

2. Akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, serta cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Keeton, et.al, (1983), *Tort and Accident Law*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co.
- Soetandio Wiknyosubroto, (1995), *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan' Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, BPHN Departemen Kehakiman.
- _____, (2002), *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma Jakarta.
- Bambang waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam' Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum'*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum'*, Penerbit Alfa Beta, Bandung.